

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Politik *Ashabiyah* Ibnu Khaldun

a. Teori Politik *Ashabiyah*

Abu Zaid Abdul Rahman Ibn Muhamad Ibn Khaldun Wali Al Din Tunisi Al Hadramain yang lahir di Tsunia pada tanggal 1 Ramadhan 732 Hijriah atau 7 Mei 1332 Masehi.¹ Beliau dibesarkan dan dididik dengan keluarga yang ahli dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan dan politik. Negara Afrika Utara sebagai tanah air Ibnu Khaldun dalam menyaksikan sebuah pertumbuhan dan kemunduran, pada abad ke 14 terdapat kemunculan dengan tanda sebuah kekacauan politik sudah mulai terlihat. Permasalahan ini juga terjadi pada kekuasaan muslim Arab yang telah jatuh sehingga terdapat banyak negara bagian untuk pisah atau melepaskan negaranya dari pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan sebuah pertentangan, perpecahan dan kericuhan yang sangat luas pada saat itu dalam sebuah kehidupan politik dengan setiap orang tetap berusaha untuk mendapatkan sebuah kekuasaan.²

Langkah perjalanan Ibnu Khaldun bisa diketahui telah melaksanakan pengabdian di pemerintah dengan sistem pemerintah satu ke pemerintah lain dan yang didapatkan selama mengabdikan Ibnu Khaldun sudah bosan dan lelah pada petualangan yang di dapatkan khususnya dalam politik. Hal tersebut Ibnu Khaldun juga mencari dukungan dengan meminta dari para suku untuk mendukung lebih banyak dengan memanfaatkan sebuah kesempatan untuk meninggalkan dalam politik dengan meminta bantuan pada Banu Arif. Maka disamping itu

¹ Muhammad Abdullah Enan, Biografi Ibnu Khaldun Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Zaman, 2013), 14-15

² Fuad Ali dan Ali Wardi, Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam, (Jakarta: CV Pustaka Firdaus, 2012), 9.

terjadilah Ibnu Khaldun menulis buku *Muqaddimah*³ yang di dalamnya juga terdapat ashabiyah yang mana buku atau kitabnya tersebut sudah terkenal dan bisa dipahami masyarakat secara luas dalam sebuah landasan teori. Karya Ibnu Khaldun *Muqaddimah* yang ditulis sesuai pengalaman dengan pemikiran yang sangat realistis bahkan bisa dibuat sebagai dasar utama teori dalam sebuah penelitian. *Muqaddimah* tersebut dijadikan sebuah pedoman dalam aktivitas politik yang mana suatu hal yang sangat penting dan masih digunakan sampai sekarang ini, secara garis besar dalam teori politik ini terdapat suatu golongan yang di dalamnya mengalami sebuah atau konflik yang dapat diselesaikan dengan memiliki dan bisa mencapai tujuan yang sama di golongan tersebut. Karya buku yang di tulis Ibnu Khaldun tersebut sebuah karya yang bisa dilihat dengan berbagai perspektif melalui sudut pandang oleh Ibnu Khaldun. Secara etimologis ashabiyah berasal dari kata ashaba yang memiliki arti mengikat.⁴ Secara fungsional ashabiyah dapat diartikan sebagai penunjuk pada sebuah ikatan dalam budaya yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah kekuatan kelompok sosial.⁵ Selain itu Ibnu khaldun juga membahas tentang pemikiran ashabiyah terdapat kesamaan dengan konsep persaudaan seperti saling bekerjasama. Disamping itu ashabiyah juga bisa dipahami sebagai solidaritas sosial dengan tekanan pada kesadaran, kesamaan dan persatuan kelompok. Bisa dikatakan ashabiyah dapat menentukan sebuah kemenangan dan keberlangsungan pada dinasti atau pemerintahan. Maka persoalan tersebut tanpa

³ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 306

⁴ Muh. Ilham, „Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun“, *Jurnal Politik Profetik Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang*, 4 no.1 (2016):4-5 Diakses Pada 14 Oktober, 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jia/article/view/509/459>.

⁵ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2014), 49.

dibarengi solidaritas sosial, maka keberlangsungan dan eksistensi dalam meraih kekuasaan akan sulit terwujud.⁶

Konsep *ashabiyah* dalam politik merupakan hasil dari sebuah bukti ketelitian Ibnu Khaldun dalam menganalisis tentang politik dan negara. Perspektif politik *ashabiyah* merupakan sebuah kunci yang harus didapatkan dalam awal sebuah terbentuknya negara. Keterlibatan unsur pada *ashabiyah* di dalam suatu negara menjadi sebuah inspirasi tersendiri dalam melakukan pergerakan politik di masa kontemporer. Salah satu teori yang Ibnu Khaldun tulis di dalam karya bukunya yaitu teori politik *ashabiyah*. Menurutnya *ashabiyah* (solidaritas sosial) merupakan hasil dari sampingan penyerangan atau sebuah agresi yang tidak terbatas terhadap pada bangsa arab saja tetapi juga terhadap pada Yahudi, Siria, Yunani, dan Romawi.⁷ Bisa diketahui, Ibnu Khaldun hidup dikalangan orang-orang *nomad* (hidupnya berpindah ke tempat satu ke tempat lain) dan mengamati transisi (terutama melalui agresi) dari *nomadisme* (perpindahan terus menerus) dan *hadarah* (peradaban atau hidup menetap). Disini terdapat perselisihan antara kaum *nomad* dengan masyarakat yang hidup menetap yang mengakibatkan jatuh bangunya sebuah siklus pada sebuah dinasti dalam proses setiap tahapan baru yang akan muncul dari kontrakdiksi yang berkonflik pada tahap sebelumnya.

Perubahan pada dinasti ini bisa terjadi karena hubungan diakletis yang kompleks antara masyarakat dan faktor *ashabiyah*. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa dalam memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan sebuah kekuasaan, maka seorang pemimpin harus bisa mempunyai solidaritas kelompok yang kuat. Tanpa solidaritas kelompok yang kuat, maka seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan dapat

⁶ Taufiq Hidayatullah, Ibnu Khaldun, Konsep Ashabiyah dan Teori Siklus Pemerintahan <https://archivehidayatillah.wordpress.com/2012/01/28/ibnu-khaldun-konsep-ashabiyah-dan-teori-siklus-pemerintahan/>.

⁷ Suyudi, "Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia"" (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Suna Kalijaga Yogyakarta, 2014), 1.

bertahan memimpin dalam kelompok tersebut.⁸ Karena itu, Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa kuat atau lemahnya suatu Negara (dinasti) sangat tergantung pada perasaan yang dimiliki pada solidaritas kelompok ini. Semakin tinggi *ashabiyah*, maka semakin kuat dinasti didalamnya. Tetapi sebaliknya, bila *ashabiyah* sudah melemah, maka dinasti atau Negara itupun akan mengalami sebuah kelemahan.

Teori *ashabiyah* memiliki solidaritas kelompok yang kuat, teori ini muncul karena terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dengan cara dilihat dari pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap kelompoknya yang menimbulkan rasa untuk menjalin sebuah kerjasama dalam berbagai bidang. Selain itu, *ashabiyah* juga melahirkan persatuan dan pergaulan di antara mereka. Bisa dilihat sampai sini, teori ini akan menyebabkan penguasa akan memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa kedalam jajaran struktur pemerintahanya.

Politik *ashabiyah* Ibnu Khaldun terdapat beberapa macam istilah pengertian yang dibagi menjadi:⁹

1) *Ashabiyah* memiliki arti positif dengan menunjuk pada sebuah konsep persaudaraan

Konsep ini dapat membentuk sebuah solidaritas sosial masyarakat dengan memiliki tujuan khusus untuk saling kerjasama dengan mengesampingkan urusan atau kepentingan pribadi dan harus bisa mencapai dalam memenuhi kewajiban antar sesama. Hal ini bentuk dari semangat untuk mendorong terciptanya keselarasan sosial dengan adanya perasaan itu muncul dari hubungan kekeluargaan, maka masyarakat yang memiliki kesamaan kesukuan atau ideologi harus memiliki sentimen kelompok atau *ashabiyah*.

⁸ Agus Sutisna, „Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah““. Jurnal Politik, 2, no 1 (2017):35 Diakses pada tanggal 14 Oktober 2022 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>

⁹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana. 2014), 50.

2) Ashabiyah dengan Konsep tentang Negara

Tindakan ini terdapat negara adalah bentuk sempurna dari ashabiyah, sebagaimana anggapan banyak orang merupakan objek kajian utama *muqadimah*. Karena negara adalah “bentuk” sempurna dari *ashabiyah*. Ibnu Khaldun memang menekankan adanya kekuatan yang memaksa dalam suatu kelompok yang memiliki ashabiyah untuk menjadi dawlah satu kekuatan politik yang mendominasi pihak lainnya. Sebaliknya, karena keberadaan ashabiyahlah sebuah dawlah yang dapat diterima kelompok dan terutama klan yang terkemuka, tergantung sepenuhnya pada ashabiyah mereka demi mewujudkan cita-cita untuk mencapai kekuasaan politik.

b. Tujuan Politik *Ashabiyah* Ibnu Khaldun

Solidaritas golongan yang kuat menjadi tujuan utama dari ashabiyah. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan dan keniscayaan (*zarruah*). Tujuan yang paling bisa dilihat yaitu untuk memperoleh kekuasaan.¹⁰ Maka yang harus diperhatikan oleh rakyat (kabilah) yang harus mengikuti ashabiyah adalah dari kelompok ini dengan melakukan bantuan dengan cara apapun untuk terwujudnya sebuah kekuasaan yang dikehendaki. Ini dilakukan dengan cara mendapatkan dukungan dari solidaritas kelompok yang sangat kuat, dengan memperhatikan, dan memberikan perlindungan, serta rasa aman bagi kelompok solidaritasnya. Tujuan hal ini dilakukan adalah untuk mencapainya sebuah keberhasilan dalam apa yang dapat diraih seperti pemilihan kepala daerah yang perlu membutuhkan banyak dukungan dari sebuah kelompok yang kuat untuk mencapai kemenangan. Teori ini dalam kekuasaan politik yang tidak didukung oleh kelompoknya yang sangat kuat dapat dipastikan akan mengalami distorsi dan guncangan dalam aktivitas politik.

¹⁰ Zuhriani, „Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila”, Jurnal Al Adalah, 1 no. XII (2014): 174-179, di Akses Pada Tanggal 4 Desember, 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/5775-ID-kontribusi-nomokrasi-islam-rule-ofislam.pdf>

Tugas dari *ashabiyah* sendiri di kehidupan masyarakat menurut Ibnu Khaldun sudah dominan. Ashabiyah telah menjadi alat dalam kekuasaan, karena dapat menjadi sebuah penggerak yang utama. Ibnu khaldun memiliki berbagai pandangan dengan tujuan *ashabiyah* untuk mewujudkan *al mulk* dan mampu memberikan perlindungan serta dapat menumbuhkan sebuah rasa aman dan memiliki rasa tenang untuk bersama. Maka *ashabiyah* dapat di artikan sebuah superioritas dengan kekuatan yang sangat dominan dalam membentuk dan memenangkan sebuah kepentingan.

Ashabiyah terdapat juga persatuan dan sebuah pergaulan antara sesama mereka dengan dasar utama penguasa memiliki sebuah strategi untuk memilih orang yang berpotensi dengan memiliki hubungan kepada penguasa di dalam jajaran pemerintahanya.

Penulis dalam kerangka teori ini mengutip dari pendapat Ibnu Khaldun mengenai Politik *Ashabiyah* diantaranya:

1) Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial bisa diperoleh pada suatu golongan yang memiliki sebuah ikatan pertalian darah atau pertalian lain dengan mempunyai kesamaan arti dalam ikatan. Hal ini karena pertalian memiliki kekuatan yang mengikat dengan sesama umat manusia yang bisa menyebabkan terdapat rasa yang sama antara yang satu dengan yang lain dengan memiliki rasa kepedulian.

Disini solidaritas sosial memiliki sistem kekeluargaan antara kedua orang yang saling membantu yang sifatnya dekat sekali, maka sudah jelas ikatan kekerabatan sesuai dengan solidaritas yang sesungguhnya. Apabila pada tingkat kekeluargaan atau kekerabatan ini jauh, maka sebuah ikatan itu semakin jauh atau sangat melemah. Tetapi untuk gantinya dalam sebuah masalah tersebut terdapatnya gantinya dengan perasaan kefamilian yang pada dasarnya terdapat pengetahuan yang lebih luas terhadap persaudaraan. Bisa disimpulkan setiap manusia hanya ingin membantu kepada orang lain karena ada rasa

khawatir dan takut apabila gagal dalam memperoleh kekuasaan dengan tetap menjaga nama baik persaudaraan.

2) Kedudukan Solidaritas Sosial

Selanjutnya untuk menghindari kekalahan dapat diprperoleh dengan bantuan solidaritas kelompok yang banyak. Sebab kemenangan berpihak pada solidaritas yang kuat dengan mempunyai banyak anggota yang sanggup berjuang untuk sebuah kepentingan bersama. Disini kekuasaan mejadi ajang perebutan dan jarang sekali dilepaskan begitu saja dengan suka rela, sebaliknya hal tersebut selalu dipertahankan dari berbagai macam cara atau sebuah strategi dalam memenangkan kekuasaan.¹¹

3) Solidaritas sebagai Kedaulatan

Solidaritas merupakan dasar sebuah kedaulatan, karena solidaritas itu sendiri bisa membuat orang untuk berusaha bersatu dalam memperoleh dan bisa mendapatkan tujuan yang sama untuk mempertahankan diri dengan mengalahkan lawan yang dilakukan bersama. Orang-orang yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi mereka mejadi pelindung untuk memenangkan yang sudah dibangun para pendahulunya untuk menjaga pendukung pendahulunya yang sudah dicintai oleh masyarakat.¹²

Adapun pandangan Ibnu Khaldun di atas dapat disimpulkan bahwa adanya solidaritas kelompok bisa efektif dengan mengendalikan dan melindungi dari berbagai ancaman untuk mendapatkan kekuasaan harus bisa bertahan dalam solidaritas kelompok.

Solidaritas kelompok dapat membentuk para pengikut dalam berpolitik dengan membentuk sebuah kekuasaan. Disini peran solidaritas kelompok sangat penting, karena seseorang memiliki strategi untuk

¹¹ Charles Issawi, Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Karangan Muqaddimah Ibn Khaldun dari Tunis 1332-1406, (Jakarta: Tintamas, 2017), 147-148.

¹² Masturi Ilham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Sebuah Karya Mega Fenomena dari Cendekiawan Muslim Abad Peretengahan Ibnu Khaldun Mukaddimah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 69.

ingin menyatukan sebuah usaha dengan tujuan yang sama maka sangat dibutuhkan banyak sedikit paksaan dengan jumlah masa yang sangat banyak, maka hal tersebut solidaritas bisa dikatakan awal darisebuah untuk terbentuknya dan berdirinya kekuasaan.¹³

Maka peneliti menyimpulkan tujuan akhir dari ashabiyah adalah pembentukan pemerintahan (*mulk*), sesungguhnya dalam kelompok apapun yang memiliki sentimen kelompok atau ashabiyah suatu orang di antara mereka pasti akan muncul sebagai kekuatan pengendali, ia dapat memaksa orang lain untuk bisa menerima keputusannya.

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal dan sikripsi yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti seperti:

Pertama, Dinasti Politik: Perspektif Teori Politik “*Ashabiyah* Ibnu Khaldun (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Banten 2007-2014. Peneliti Anwar Saputra tahun 2017. Hasil penelitiannya peneliti berfokus pada faktor apa saja yang mendukung terjadinya dinasti politik di Banten dengan melihat pada dinasti politik menurut teori *ashabiyah* Ibnu Khaldun. Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data atau informasi, studi pustaka dan dokumen. Juga terdapat sumber data primer yang diperoleh dari observasi yang sifatnya tertulis dan data sumber sekunder lanjutan dari data primer berupa dokumentasi. *Kedua*, Kekuasaan dan Legitimasi

¹³ Munawwir Syadzli, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta:UI Pres, 2010), 105.

Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun. Peneliti M Rudianto tahun 2018. Hasil penelitiannya mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Khaldun yang fokus pada objek penelitiannya mengenai kekuasaan dan legitimasi dalam kaca mata politik Islam dengan melihat riwayat kehidupan dan pemikiran politik Ibnu Khaldun. Metode pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan memperoleh datanya seperti buku, jurnal dan website. *Ketiga*, Etika Politik Ibnu Khaldun (Analisis Terhadap Konsep Kepemimpinan dalam Muqaddimah). Peneliti Muflih Fahmi Kaunain, S. IP tahun 2017. Hasil penelitiannya berfokus pada konsep etika politik kontemporer dalam sebuah kitab hasil karya Ibnu Khaldun yaitu kitab *Muqqadimah* yang mana mampu memberikan sebuah gambaran negara agar tidak menuju kehancuran dan bagaimana etika politik yang harus diterapkan oleh sebuah negara baik pemimpin maupun rakyatnya maka bisa dilihat dari kitab *muqqadimah* dengan adanya *ashabiyah* atau solidaritas kelompok yang sangat kuat. Metode pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi obyek penelitian juga memberikan interpretasi yang telah dideskripsikan untuk menarik relevansi atau implikasi masalah yang akan diteliti.

Perkembangan konsep maupun teori yang dikembangkan seorang intelektual tentu tidak terlepas dari kondisi sosial maupun politik yang mengharuskan dirinya merespon, menganalisis, kemudian memberikan solusi untuk memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, solusi yang diberikan akan membunai dan banyak memberi manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Persoalan yang dihadapi langsung direspon dengan mengedepankan metode yang aktual dan relevan dengan konteks yang dihadapi. Selain itu, dalam konteks ilmiah, penyelesaian semacam ini bisa membantu perkembangan teori baru. Tentu saja, ini

akan memberi manfaat besar bagi kelangsungan masyarakat luas.

Ibnu Khaldun merupakan salah satu intelektual yang biasa dikatakan demikian. Berangkat dari kontak dan hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ditemui diberbagai tempat, serta analisisnya terhadap sejarah sebelumnya, ditambah lagi pengamatannya yang menggunakan pendekatan sosiologis, memberikan kontribusi baru bagi perkembangan keilmuan saat itu, dan membuka cakrawala baru bagi perkembangan keilmuan selanjutnya. Karenanya, maka tidak salah apabila banyak kalangan intelektual maupun akademisi menempatkannya sebagai ilmuwan modern.¹⁴

Karier politik Ibnu Khaldun dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin. Ketika Ibnu Tafrakin ditaklukkan Abu Zaid dalam sebuah intrik dan perebutan kekuasaan, Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerja sama dengan Sultan Abu Inan di Tlemen, disini ia menjabat sebagai sekretari selanjutnya Ibnu Khaldun melibatkan diri dalam sebuah intrik politik, yaitu bekerja sama dengan Amir Abu Abdullah Muhammad untuk merebut kekuasaan sang sultan. Intrik ini melahirkan malapetaka bagi Ibnu Khaldun. Ia dipenjarakan oleh Abu Inan selama dua tahun ketika persekongkolan politik dan kekuasaan tersebut ditumpas. Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengabdikan kepada Abu Salim, dan diangkat sebagai sekretaris serta penasihatnya.

Setelah Abu Salim wafat pada tahun 1362, Ibnu Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari Granada. Ia diangkat sebagai duta besar, salah satu tugasnya sebagai utusan Sultan Muhammad V adalah menemui Pedro dari Castilla, Spanyol. Ibnu Khaldun bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja karena ia bertindak sebagai penandatanganan

¹⁴ Berkas pengamatannya terhadap sejarah tersebut Ibnu Khaldun sering diberi gelar bapak historiografi. lihat Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Terj. Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.148

perjanjian perdamaian antara kedua Negara, karena tidak sepaham dengan sebagian pembesar Granada, Ibnu Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Hafsi sebagai perdana menteri. Di tengah jalan, intrik dan pergolakan politik yang melanda kerajaan-kerajaan Islam menjadikannya beralih loyalitas kepada Abu Abbas, sepupu Muhammad Al-Hafsi, yang merebut kekuasaan.¹⁵

Ibnu Khaldun mengembangkan pemikiran dan kontemplasi yang berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. Hal ini dilakukan setelah fase pengabdianya pada kekuasaan dalam berbagai pemerintahan. Tampaknya, Ibnu Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya dan memutuskan untuk hidup menyendiri guna menyusun karya-karyanya di Benteng Banu Salamah. Dalam masa kontemplasi yang relatif singkat inilah, Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, *Al-Ibar* beserta *Mukaddimah* nya.¹⁶

Adapun pemikiran Ibnu Khaldun di antaranya adalah:

1) Negara

Ibnu Khaldun memulai pembicaraan mengenai negara berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup berkelompok dan saling memerlukan bantuan. Hal ini dilakukan manusia untuk bisa bertahan hidup dan untuk mendapatkan rasa aman. Oleh karenanya diperlukan kerja sama antara sesama manusia. Kerja sama tersebut membentuk suatu organisasi kemasyarakatan. Dari sinilah Ibnu Khaldun mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah merupakan keharusan. Karenanya,

¹⁵ Fuad Ba'ali dan Ali Mawardi, *Ibnu Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 10-11.

¹⁶ Madjid Fachry, *A History of Islamic Philosophy*, (New York: Colombia University Press, 1988), hlm. 324.

peradaban umat manusia itu tidak lepas dari organisasi masyarakat tersebut.¹⁷

Seperti yang dikemukakan di atas, Ibnu Ibnu Khaldun berpandangan bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup masyarakat, karena sesungguhnya manusia memiliki watak hidup bermasyarakat. Tatanan sosial akan berubah dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat yang lain senantiasa kemudian mengikuti faktor-faktor yang dimiliki oleh masyarakat pertama, yaitu menyangkut iklim, cuaca, tanah, makanan, sumber tambang, kemampuan berfikir, jiwa dan emosi mereka.¹⁸

Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan beradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara anggota masyarakat.¹⁹ Menurutnya, peran sebagai penengah dan pemisah hanya dapat dilakukan oleh seorang dari anggota masyarakat itu sendiri. Seseorang tersebut harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka sehingga tidak seorangpun di antara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan, otoritas dan wibawa tersebut adalah raja, khalifah atau kepala negara.²⁰

¹⁷ Hakimul Ikhwan Afandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h.89

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),h.99

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),h.92

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),h.99

2) Kekuasaan

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, visible maupun invisible untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan dan sedikit orang yang mau menyerahkannya.²¹ Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pemimpin sebagai pemilik kekuasaan berperan sebagai penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesatuan sosial, dan mencegah dari hal-hal yang dapat merusak. Untuk itu pemimpin dibutuhkan sebagai pengganti nabi menyeru kepada kewajiban islam dan menegakkannya bersama-sama²². Kompetisi kekuatan antar kelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, dimana pemegang kebijaksanaan dan perseorangan atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari masa dengan berbagai macam manuver siasat atas kelompok, profesi, bahkan agama.

a. Faktor Internal

Ibnu Khaldun dianggap sebagai perintis dan orang pertama yang mengkaji ilmu sosial dan merumuskan hukum-hukum kemasyarakatan. Secara umum, corak pemikiran Ibnu Khaldun dalam mengemukakan argumentasi tentang berbagai persoalan masyarakat itu berpijak pada realitas, tidak seperti para filosof yang sebelumnya,

²¹ Al-Allamah Abdurrahman Bin Muhammad Bin Kahaldun, *Muqaddimah*, Terj. Masturi Irham, h.Vii 43Al-Allamah Abdurrahman Bin Muhammad Bin Kahaldun, *Muqaddimah*, Terj. Masturi Irham, h.Vii

²² Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet,2016),h.93

yang cenderung idealis, menginginkan sesuatu yang berada dalam pikirannya atau mengharapkan sesuatu yang ideal, sehingga lupa pada realitas yang perlu dipahami sebagai tempat berpijak. Maka pada akhirnya, gagasan-gagasan filosof yang idealis ini hanya berkuat pada diskursus-diskursus metafisis, yang secara nyata tidak mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat. Dari sisi ini, Ibnu Khaldun menawarkan pendekatan baru untuk memahami realitas, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan baru yang bisa dirasakan langsung untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat dan secara praktis dapat dirasakan manfaatnya.²³

b. Faktor Eksternal

Wilayah Maghrib dan Andalusia dimana Ibnu Khaldun dibesarkan adalah wilayah Islam yang sejak awal berusaha memisahkan diri dari pemerintahan pusat Islam, baik Umayyah, Abbasiyah maupun Fatimiyah. Pada masa Ibnu Khaldun, kondisi Islam tidak lagi pada puncak kejayaan dan keemasan, melainkan berada di dalam kemunduran akibat perpecahan internal kekuasaan Islam, sehingga wilayah Andalusia dan Maghrib termasuk wilayah dalam perebutan ketiga kekuasaan Islam yang berpengaruh pada saat itu. Pertentangan, konflik, dan perebutan kekuasaan mewarnai sejarah pergolakan politik di kedua wilayah ini.

Ketika kekuasaan Islam tidak lagi terpusat dalam satu komando, Andalusia dan Maghrib yang sejak awal berpotensi untuk melepaskan diri dari cengkaman kekuasaan Islam pusat kemudian semakin mendapat legitimasi untuk segera melepaskan diri (kemerdekaan) dari kekuasaan yang sedang bertikai. Kondisi sosial politik yang tidak menentu seperti ini mengakibatkan aktivitas intelektual di wilayah itu mengalami nasib kurang

²³ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah, ter. Masturi Ilham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 1085-1086

menguntungkan dibandingkan dengan wilayah Islam lain di Timur, seperti: Irak, Syria, dan Mesir.²⁴

Secara terperinci, Al-Jabiri menguraikan bahwa perbedaan aktivitas intelektual di kedua wilayah itu disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Tidak adanya warisan tradisi Islam. Sejak sebelum penaklukan Islam dan masa penaklukan Islam di Andalusia dan Maghrib pada tahun 92 H/ 694 M itu tidak ada gerakan pemikiran dan keilmuan di wilayah itu hingga sampai pada masa kekuasaan Bani Umayyiah dalam kekuasaan Abdurrahman Al-Nashir pada 300 H/ 912 M. Ini berbeda dari wilayah timur, seperti: Irak, Syria, Persia yang telah mengalami proses Hellenisasi yang cukup lama.
- 2) Fakta bahwa kedua wilayah tersebut telah melepaskan diri dari kekuasaan pusat wilayah Timur yang sedang bertikai dan bersaing dalam masalah ideologi politik yang telah menciptakan kebudayaan tersendiri. Pada masa ekspansi ideologis dari khalifah Umayyah, Abbasiyah dan Fatimiyah, wilayah Andalusia dan Maghrib tidak mampu memahami perkembangan intelektual ini, kecuali hanya sebatas pada pemahaman intelektual pada masa penaklukan Islam awal, yaitu Islam yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in yang hanya bersumber pada tradisi riwayat (alhadith) dan nash (Al-Qur'an). Berbeda halnya dengan di wilayah Islam Timur, disana berkembang berbagai madzhab hukum sebagai ideologi politik, teologi, filsafat, gramatika bahasa. Akibatnya, kedua wilayah ini tetap mempertahankan independensi intelektual

²⁴ Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 65-66

sebagai akibat dari upaya mempertahankan kemerdekaan politik.²⁵

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Kebijakan Publik merupakan kewenangan pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan masyarakat serta dunia usaha. Istilah kebijakan publik sebetulnya sudah pernah dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan pembelajaran seperti halnya di perguruan tinggi ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*) strategi keputusan (*decision*), standar, proposal, serta *grand design*.²⁶ Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan public (*public policy*) terutama dalam garis ilmu politik. Setiap definisi tersebut memberikan pandangan yang beragam. Hal ini disebabkan karena banyaknya definisi di pengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin di telaah oleh seorang analisis kebijakan.

Pada kerangka teori ini, peneliti akan menjelaskan beberapa batasan sebagai keperluan membentuk kerangka atau model penelitian dari beberapa konsep maupun definisi yang akan digunakan. Selanjutnya, suatu batasan operasional akan dicantumkan peneliti dengan cara menunjukkan ciri-ciri utama dari setiap konsep atau definisi yang akan dipakai. Salah satu pendapat Robert Eyestone tentang Kebijakan Publik dapat didiskripsikan sebagai “hubungan suatu unit

²⁵ Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 66-67

²⁶ Jones, O, Charles, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Polisy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 25.

pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep ini mengandung penjelasan yang sangat luas dan tidak mungkin karena apa yang dimaksud kebijakan public dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik dalam pendapat Thomas R. Dye mengatakan Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Akan tetapi batasan ini kurang memperbedakan kejelasan antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dengan yang sebenarnya dilakukan terhadap pemerintah.²⁷ Disamping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada diluar ranah kebijakan politik. Seorang ilmuwan politik Carl Friedrich mengatakan bahwa “Kebijakan sebagai suatu arah yang tindakan yang dilontarkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah pada suatu lingkungan tertentu, hingga memberikan kendala serta keleluasan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan, dengan merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”²⁸

Pendapat ini sebenarnya bersifat ambigu (mendua), namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan sekedar sesuatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Carl, Chief J.O Udoji dalam Wahab, yang menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Selain itu gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud, layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintahan

²⁷ Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 1995, hlm 1.

²⁸ Budi, Winarno. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita, 2008. Hlm 16

yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.²⁹

3. Teori Sistem Politik David Easton

Menurut David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat didalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif diimplementasikan.³⁰ Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Bila kehidupan politik dipandang sebagai suatu sistem aktivitas, maka dijumpai suatu konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai operasi suatu sistem. Masukan-masukan (input) yang datang dari komponen lain dalam sistem merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Masukan itu dikonversi oleh proses sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang otoritatif. Kebijakan-kebijakan itu mempunyai konsekuensi terhadap sistem politik itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya. Gambaran kehidupan politik melalui pendekatan sistem digambarkan oleh David Easton dalam gambar sebagai berikut

Gambar 2.1 Konsep Sistem Politik Menurut David Easton.³¹



²⁹ Wahab. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW, 1998.

³⁰ Varma, S.P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1992,

³¹ Asep Saeful Muhtadi dan Zaenal Mukarom, *Komunikasi Politik*, 73.

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa unsur sistem politik diatas secara umum ada input, proses, output, feedback dari masyarakat dan lingkungan. Input dalam sistem politik terdapat tuntutan dan dukungan, input berupa tuntutan yang muncul dalam sumber kebutuhan masyarakat yang sangat langka. Adapun input berupa dukungan dari luar dan dari dalam seperti berupa pandangan atau pikiran seseorang atau orang lain dan partai politik untuk bertindak. Oleh karena itu sistem komunikasi menjadi hal yang paling penting di negara demokratis.

Adapun output yang memiliki keputusan otoritatif dalam memenuhi input yang masuk. Output menjadi mekanisme dukungan untuk memenuhi tuntutan dari sistem politik. Input yang masuk baik tuntutan maupun dukungan dapat mempengaruhi lingkungannya. Selain itu, keinginan dan kemampuan sistem politik dalam melaksanakan dan mengelola input yang masuk dapat mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Tetapi tidak semua lingkungan termasuk pada sistem politik, baik dari lingkungan luar sistem politik tersebut.

Dari keseluruhan konsep atau definisi yang telah disebutkan dapat di tarik kesimpulan, ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu:

- a. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (*aktor*), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.
- b. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin di capai oleh pembuat kebijakan
- c. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan yang diinginkan maupun yang tidak.

Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan:

a. Kebijakan Umum (strategis)

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkungannya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis untuk mencapai harapan nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

- 1) Undang-undang (UU), yang kekuasaan pembuatannya terletak ditangan Presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pelaksanaan Undang-undang, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
- 3) Keputusan Presiden (Kepres) atau Instruksi Presiden (Inpres), yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang ditangan presiden
- 4) Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden.³²

b. Kebijakan Manajerial

Kebijakan manajerial merupakan tolak ukur terhadap suatu bidang utama (*major area*) pemerintahan. Kebijakan ini merupakan penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. wewenang dalam kebijakan ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kedepannya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri

³² Nuryanti Mustar, *Pemahaman Kebijakan Publik (Formasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015. Hlm 14.

c. Kebijakan Teknis Operasional

Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertamadepartemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-depatemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi, pimpinan lembaga non departemen masing-masing bidang administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.³³ Kandungan dalam kebijakan teknik ini harus sesuai dengan kebijakan diatasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non departemen atau instruksi direktur jenderal biasanya adalah sebagai instruktur.

4. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Membahas tentang kesejahteraan memiliki arti keamanan dan keselamatan dengan adanya kesenangan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang baik ini bukan hanya diukur dengan ekonomi dan fisik belaka, spiritual. Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa kesejahteraan itu adalah terpenuhinya kebutuhan pokok lahir dan bathin, yang meliputi dari segi sandang, pangan, dan papan juga dari segi rohani, terpenuhinya pendidikan, mempunyai keterampilan yang berdasarkan atas ketaqwaan juga

³³ Nuryanti Mustar, *Pemahaman Kebijakan Publik (Formasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015. Hlm 15-16.

sekaligus pengalaman dari agama yang memotivasi untuk berprestasi.³⁴

b. Kesejahteraan menurut Islam

Kesejahteraan perspektif menurut Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman islam yaitu Al-Qur'an dan AL-hadits. Al-Qur'an secara tegas sekli menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia itu sendiribahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial. maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis-garis harus dipenuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.³⁵

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain, pendapatan dari hasil bercocok tanam disawah, peternakan, pendapatan industri rumahan pendapatan PNS dan pendapatan dari karyawan swasta. Aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah

- 1) Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk migrasi dan fertilitas.
- 2) Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka) kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan serta status kesehatan ibu dan balita.

³⁴ Adi I.R. *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan)*: Rajawali Pers, Jakarta 2015. Hal 261.

³⁵ Helmy, Masdar. *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*: Toha Putra, Semarang 2013. Hal 22.

- 3) Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan.
- 4) Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak.
- 5) Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- 6) Perumahan dan lingkungan, yang meliputi kualitas rumah (tempat tinggal), fasilitas lingkungan yang meliputi akses untuk memperoleh informasi, hiburan dan kegiatan sosial budaya.

Program kesejahteraan sosial adalah kebijakan yang terarah, terpadu yang berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Diantara tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah:³⁶

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
- 2) Memuliakan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
- 3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- 4) Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

³⁶ Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Keterbatasan ekonomi dalam terkaitnya tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. *Indicator* ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara objektif dengan pendekatan berbasis uang (*monetary based indicators*).

5. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Dalam bahasa Arab yaitu *Syirk*, artinya bergaul. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa solidaritas bersama. Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang bersatu dengan cara tertentu, disebabkan adanya hasrat-hasrat kemasyarakatan yang sama. Adapun syarat-syarat yang menjadi timbulnya masyarakat adalah

- 1) Harus ada sekumpulan manusia yang banyak
- 2) Telah bertempat tinggal disuatu daerah tertentu dalam waktu yang lama.
- 3) Adanya aturan-aturan yang mengatur untuk kepentingan bersama.

Masyarakat merupakan satu kesatuan manusia yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan. Manusia sering disebut makhluk sosial, makhluk ekonom, aktualisasi dari diri dan makhluk yang berbicara atau makhluk yang berfikir. Manusia merupakan makhluk yang mempunyai aneka ragam

sebutan, pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang.³⁷

b. Masyarakat menurut Islam

Masyarakat menurut Islam adalah tidak diragukan lagi tujuan utama Al-Quran menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil, berdasarkan etika dan dapat bertahan di bumi ini. Islam adalah sistem Ilahi dipandang dari perundang-undangannya, ilmiah dari segi pengalaman sejarahnya, Islam membangun masyarakat Islam bersifat kolektif antar anggotanya. Dengan iman anggota masyarakat menjadi hamba Allah, bersaudara dan sumber-sumber kekayaan alam yang telah dijadikan untuk mereka. Mereka membina masyarakat atas dasar keinsyafan bahwa usaha atau kerja menjadi sumber hak dan derajat seseorang. Atas kesadaran bahwa persaudaraan seiman menjadikan sekutu dalam pekerjaan yang baik sumber penghasilan atau kerja.³⁸

Setelah menelisik lebih dalam masyarakat Islam yang sebenarnya, ada dua rujukan yang digunakan. Pertama melakukan pencarian dan interpretasi konsep yang mendekati gambaran masyarakat Islam dalam Qur'an. Konsep yang banyak jadi acuan adalah *ummah*. Beberapa konsep *ummah* yang dimaksud adalah *pertama* ummat muslimat, yaitu masyarakat yang berkhidmat, tunduk patuh dan pasrah kepada Allah seperti yang terdapat pada (QS. Al-Baqarah: 128) :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
 وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ

³⁷ Soekanto, soejono. Sosiologi suatu pengantar. Yokyakarta: rajawali pers, 2013.

³⁸ Rahman, fazlur. 2016, study agama dan masyarakat. Bandung: Pustaka, 2016. Hal: 33.

Artinya: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Kedua, ummat wasatha, yaitu masyarakat pertengahan atau moderat yang memiliki peran sebagai syuhada'ala al-nas (QS. Al-Baqarah: 143):

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِن
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menya-nyikan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Ketiga, ummat wahidat, yaitu masyarakat, yang satu dalam agama: iman dan kebenaran (QS Al-Baqarah: 213, QS Al-Anbiya':92).³⁹

a. QS Al-Baqarah: 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab), setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

³⁹ Dadang Kahmad. Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya. Diakses pada tanggal 27 November 2022 <https://uinsgd.ac.id/masyarakat-islam-yang-sebenar-benarnya/>

b. (QS. Al-Anbiya': 92)

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Artinya: Sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.

Keempat, khayra ummat, yaitu masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kenutamaan (al-khayr), pada proses kemajuannya memungkinkan berjalannya mekanisme amar ma'ruf nahi munkar.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَرَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. Ali-Imron:110)

Kelima, ummat qa'imat, yaitu masyarakat yang bercirikan: (a) selalu membaca ayat-ayat Allah dan bersujud pada tengah malam, (b) beriman kepada Allah dan hari akhir, (c) amar ma'ruf nahi munkar, (d) bersegera dalam melaksanakan kebaikan.

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ

ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat). (Q.S. Ali-Imron:113)

Keenam, ummat muqtashidat, yaitu masyarakat yang bersahaja, proposional dalam bertindak, dan tidak berlebihan (QS. Al-Maidah: 66).

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Konsep umat dari rujukan Al-Qur'an tersebut diatas berkaitan satu sama lain merupakan satu kesatuan, semua karakter yang menyertainya ada dalam sebuah masyarakat Islam yang ideal menurut Allah SWT.

c. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mengandung makna lahir dan batin seluruh masyarakat yang berisikan unsur kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesahatan jasmani dan rohani, serta pelayanan sosial dan

pemenuhan kebutuhan materi masyarakat pada umumnya. Dalam menjalani kehidupan, manusia senantiasa diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhinya. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut seringkali seseorang dibenturkan pada permasalahan yang apabila dibiarkan mungkin saja akan berkembang semakin kompleks. Oleh karena itu, sumber yang ada dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang mengatasi permasalahan yang ada. Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian kegiatan atau aktifitas yang terorganisir yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar dan norma-norma sebagai tujuan, merupakan cita-cita, pedoman, aspirasi, dan juga supaya terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.⁴⁰

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau karanga-karang melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai referensi atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu menjadikan bagian tersendiri merupakan kajian penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti seperti:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1.	K. Khoiruddin/ 2016	Analisis Teori Ashabiyah Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat.	berfokus pada faktor dalam perpolitikan tidaklah begitu berpengaruh, karena politik merupakan sesuatu yang

⁴⁰ Harianti. *Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ulujangang Kecamatan Botolempangan Kabupaten Gowa*. Skripsi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar. 2018 Hal. 30-31.

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
			<p>dilakukan bukan menggunakan perasaan, tentunya hal ini dapat dilihat sepanjang hidup Ibn Khaldun, dimana beliau sering singgah di rumah tahanan. Dalam perpolitikan para penguasa hanya mengandalkan logika saja, sedangkan <i>Ashabiyah</i> merupakan hal; yang berhubungan dengan perasaan. <i>Ashabiyah</i> ekonomi kerakyatan kekuatan ashabiyah ini nantinya akan membangun sinergisitas dengan <i>Ashabiyah</i> dibidang lainnya.</p>
2	M Rudianto/2018	Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun	<p>mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Khaldun yang fokus pada objek penelitiannya mengenai kekuasaan dan legitimasi dalam kaca mata politik Islam dengan melihat riwayat kehidupan dan pemikiran politik Ibnu Khaldun.</p>
3	Harianti/2018	Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.	<p>Program yang berbasis peningkatan ekonomi masyarakat Desa Ulujangang yang dikemas dalam bentuk penyuluhan berupa peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat yang bergerak dibidangnya masing-masing adalah suatu bentuk kepedulian dan keseriusan Pemerintah Desa untuk membangun masyarakatnya agar lebih maju dan mempunyai semangat atau daya saing yang tinggiUpaya pemerintah Desa Ulujangang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>
4	Sholih Muadi/2016	Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik (Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02)	<p>konsep dan kajian teori tentang perumusan kebijakan publik metode menggunakan kajian teori atau tinjauan pustaka</p>
5	Muhammad Manar/2018	Politik dalam Perspektif Aristoteles dan Ibnu Khaldun.	<p>Berfokus pada Pemikiran tentang kekuasaan, baik Aristoteles maupun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa</p>

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
			hukum merupakan sumber kekuasaan, yang hanya apabila hukum, yang menjadi sumber kekuasaan, maka pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan kebaikan dan kesejahteraan umum.

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada pemilihan metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode kualitatif sehingga diharapkan dapat memperoleh data secara mendalam. Sedangkan pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah antara lain; metode survey, deskriptif analitik. Selain itu perbedaan yang signifikan terdapat pada fokus penelitian.

Sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan kebijakan Pemerintah Desa Angkatan Kidul, Kecamatan Tambakromo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu: perspektif politik *Ashabiyah* Ibnu Khaldun tahun 2021. Secara umum, penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah desa Angkatan Kidul mengatasi tingkat kemiskinan masyarakat menurut persepsi *Ashabiyah* Ibnu Khaldun. Adapun perbedaan ini diharapkan akan menimbulkan hasil yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

C. Kerangka Berpikir

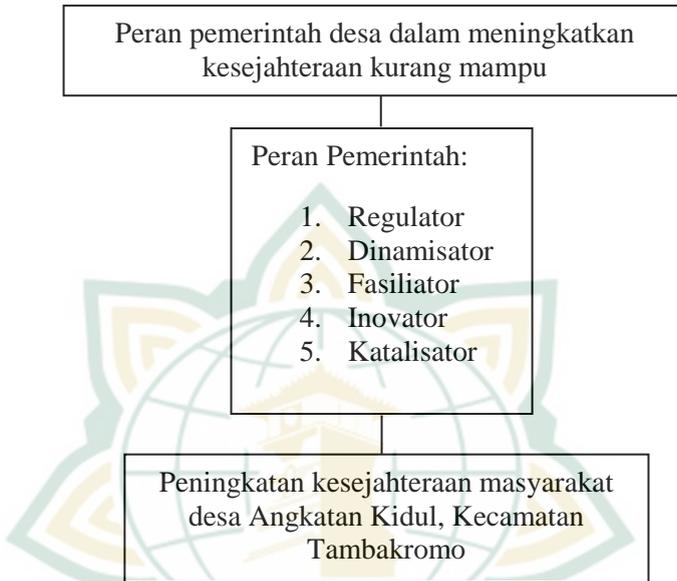
Kerangka berpikir didefinisikan oleh Nawawi , pemerintah daerah adalah lembaga atau institusi-institusi publik yang mempunyai kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya dalam mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹ Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah merupakan sebuah lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dan kekuatan dalam melakukan berbagai tindakan dan upaya membangun daerah secara otonom dalam rangka mencapai tujuan baik dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan secara berdaya guna sebagai bagian dari tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah sebagaimana yang dia manatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tuntut untuk mampu berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai bagian utama dari peningkatan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang kehidupan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien dan tanpa tindakan diskriminatif.

Berkaitan dengan peran pemerintah desa Angkatan kidul, Kecamatan Tambakromo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, maka salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah utamanya pemerintah desa dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan program bantuan sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu diantaranya program PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan bantuan Bedah rumah serta bantuan sosial lainnya. Hal ini tentu saja sebagai salah satu kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus masyarakat kurang mampu Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo.

⁴¹ Nawawi, Ismail. Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja. PT. Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta. 2013.

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.2 diatas dapat di jelaskan bahwa fokus penelitian ini mengenai peran kebijakan Pemerintah desa Angkatan Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Adapun deskripsi gambar 2.2 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran pemerintah diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa Angkatan Kidul dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dengan menjalankan program bantuan sosial.
2. Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja perahu pinisi dalam program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan usaha.
3. Pemerintah sebagai dinamisator dapat diartikan sebagai penggerak bagi masyarakat dimana pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan

secara intensif dan efektif kepada masyarakat pekerja perahu dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

4. Pemerintah sebagai fasilitator diartikan sebagai pendamping melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau pemodalan kepada masyarakat yang diberdayakan.
5. Pemerintah sebagai inovator diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menterjemahkan berbagai macam program dengan bahasan yang sederhana sehingga dapat mengunggah partisipasi masyarakat.
6. Pemerintah sebagai katalisator diartikan bahwa pemerintah harus menjadi agen dalam percepatan pengembangan potensi daerah yang akan menjadi modal sosial untuk menarik partisipasi masyarakat.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya taraf hidup yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh para pekerja perahu phinisi baik dari segi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, perumahan yang layak serta makanan yang bergizi.

